

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

B. Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum dan Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Aria Suyadi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004).

Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2017).

Brotodiharjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

Darwin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009).

- Djafar, Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dengan Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Makassar: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999).
- _____, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cetakan 6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
- Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Kepailitan & Lembaga Arbitrase*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017).
- Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: Keni Media, 2012).
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Pandiangan, Roristua, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- R.F. Saragih dan Erna Widjajanti, *Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Roda Inti Media, 1999).
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003).
- Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Siahaan, Marihot P, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010).

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Suandy, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2000).
- Subhan, Muhammad Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).
- Suparji, *Kepailitan*, (Jakarta: UAI Press, 2018).
- Suparnyo, *Hukum Pajak: Suatu Sketsa Asas*. (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012).
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Tansuria, Billy Ivan, *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

C. Artikel Ilmiah

Adi Nugroho. “Analisis Yuridis terhadap Keadaan Insolvensi dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Artikel Ilmiah, Kementrian Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang*. (2013):

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/139>

Litari Elisa Putri, St. Laksanto Utomo. “Sinkronisasi Hukum Utang Pajak sebagai Kreditor Preferen dalam Proses Kepailitan.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2, Issue 1*, (Februari 2021):
<https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/issue/view/3>

Idris Abas, Luki. “Analisis Yuridis Peran Kurator dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Focus Journal of*

Law, Vol. 2 No. 2, (2022): <https://jurnal.publikasi-untagcirebon.ac.id/index.php/focus/article/view/308>

Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati. “Pengaturan Tanggung Jawab Kurator terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis.” *Universitas Negeri Semarang*, (2017): <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/download/682/437>

Christabella Deandra Florentia Warouw, Irwan Aribowo. “Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas dalam Proses Pailit”. *Jurnal Educoretax 1*, No. 1, (Maret 2021):

<https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/11/3>

Nurislamiati, Siti Fatimah Citra. “Tinjauan Hukum Penerapan Hak Mendahulu Utang Pajak dalam Perkara Kepailitan PT Industries Badja Garuda berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. *Dharmasiswa*, Vol. 2, No. 3. (September 2022): <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/35/>

Siburian, Ruth Yohana. “Tanggung Jawab Kurator terhadap Pemenuhan Hak Negara atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2017):

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/issue/view/900>

D. Skripsi dan Tesis

Prayudina Amanda Desy. “Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Fa. Litha & Co.)” Universitas Bosowa Makassar, 2008. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4441/2018%20AMANDA%20DESY%20PRAYUDINA%204515060092.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Aliyah Hilal Ramadhany Firdaus. “Hak Mendahulu Negara atas Utang Pajak terhadap Penjualan Boedel Pailit Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 436K/Pdt.Sus-Pailit/2018.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Yuhelson. "Tanggung Jawab Kurator dalam Pelaksanaan Pembagian Boedel Pailit berdasarkan Kedudukan Para Kreditor (Studi PT. Peony Blanket Industry Indonesia)." Universitas Diponegoro, 2010.